

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi setelah pandemi COVID-19 tampaknya menjadi perhatian utama di berbagai negara. Wabah ini telah membuat dunia terhenti secara tiba-tiba karena sulitnya mengendalikan penyebaran virus tersebut. Menurut Kemendikbudristek, Indonesia menduduki posisi ketiga dalam hal jumlah siswa terdampak pandemi, dengan sekitar 68 juta siswa yang terpaksa harus mengikuti pembelajaran dari rumah (Cerelia et al., 2021, p. 2). Tidak selesai sampai disitu Pandemi covid-19 juga memperburuk kesenjangan pendidikan di Indonesia, menurut laporan GSMA (*Global System Mobile Communications Assosiations*) Asia Pasifik 2020, terdapat sekitar 61 juta orang di Indonesia yang masih belum terhubung dengan akses internet (UNICEF, 2021, p. 8). Dan hanya 34% peserta di Indonesia yang terhubung ke internet dan hanya 28% guru yang mampu menggunakan platform pembelajaran daring (Smeru Research, 2020, p. 1).

Penulisan diatas menyempurnakan permasalahan yang dialami oleh negara Indonesia terkait pendidikan, apalagi melihat ketertinggalan nilai PISA (*Programme for International Student Assesment*) Indonesia Tahun 2018 yang diterbitkan oleh The OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) menunjukkan bahwa Indonesia berada di bawah rata-rata organisasi tersebut. Asesmen ini dilakukan setiap tiga tahun untuk membandingkan kemampuan membaca, matematika, dan sains dari sekitar 600.000 siswa berusia 15 tahun di 79 negara, termasuk negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah (Schleicher, 2019, p. 48).

Berkaitan dengan keterampilan membaca siswa Indonesia mendapatkan skor rata-rata 371, yang jauh di bawah rata-rata OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) sebesar 487, menempatkan Indonesia di peringkat 74. Posisi ini berada di bawah Thailand yang ada di peringkat 68, Malaysia di peringkat 58, dan Singapura di posisi kedua, namun masih lebih baik dari Filipina yang berada di peringkat 79. Untuk kemampuan

matematika, Indonesia mendapatkan skor 379, juga di bawah rata-rata OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) sebesar 489, dan menduduki peringkat 73. Indonesia tertinggal dari Thailand yang berada di peringkat 58, Malaysia di posisi 48, dan Singapura di peringkat 2, tetapi tetap lebih tinggi dari Filipina di peringkat 78. Sementara itu, untuk sains, siswa Indonesia mencatat skor rata-rata 389, dibandingkan dengan rata-rata OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) sebesar 489 (Schleicher, 2019, p. 53).

Keberagaman masyarakat Indonesia dalam hal suku, agama, ras, dan budaya memiliki potensi besar untuk menimbulkan perbedaan pandangan, pendapat, serta cara mengapresiasi dan merefleksikan keberagaman itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan yang dapat mendukung dan mendorong para peserta didik untuk menerima keberagaman ini sebagai suatu berkah, bukan sebagai masalah. Hal ini dikarenakan pendidikan di manapun selalu terkait secara dialektis dengan lingkungan dan sistem sosial tempat pendidikan tersebut dilaksanakan, dan tidak pernah berdiri sendiri.

Isu Pendidikan yang muncul kepermukaan saat ini, dikatakan oleh Djohar dalam (Lubna, 2014) diantaranya adalah 1) Pendidikan telah kehilangan objektivitasnya dan masih belum relevan dengan realitas yang dihadapi peserta didik dalam masyarakat; 2) Pendidikan belum berhasil mendewasakan peserta didik; 3) Pendidikan belum mampu mengembangkan pola pikir kritis; 4) Pendidikan belum menciptakan individu yang terdidik, apalagi berakhlak; 5) Pendidikan masih membatasi kebebasan peserta didik; 6) Pendidikan belum mampu mendorong pembelajaran mandiri; 7) Belum berhasil menghasilkan kemandirian, dan 8) Pendidikan belum dapat memberdayakan serta membudayakan peserta didik secara optimal. Untuk memecahkan masalah tersebut maka pemerintah mengupayakan sebuah alternatif kebijakan dengan meluncurkan kebijakan pendidikan episode 5 yakni “Program Sekolah Penggerak” yang pada saat itu dianggap alternatif terbaik dalam percepatan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disebut PSP merupakan program penyempurnaan pendidikan dari program-program sebelumnya untuk

meningkatkan kualitas belajar siswa dengan 5 jenis intervensi yang dijanjikan pemerintah dalam mengakselerasi sekolah bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran.

Program Sekolah Penggerak memiliki perbedaan dengan program sekolah model atau sekolah rujukan. Berikut adalah perbedaannya:

- 1) Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama untuk menjalankan program sekolah penggerak
- 2) Ada lima jenis intervensi yang akan diberikan oleh pemerintah kepada sekolah penggerak yang lolos seleksi, yaitu: dukungan konsultatif dan asimetris untuk pemerintah daerah, pelatihan serta bimbingan bagi kepala sekolah dan guru, penerapan metode pembelajaran baru, perencanaan yang didasarkan pada data, dan proses digitalisasi di sekolah.
- 3) Program ini mencakup jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB, baik sekolah negeri maupun swasta dalam berbagai kondisi.
- 4) Program ini berkelanjutan hingga semua sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak (Kemendikbud Ristek, 2021, p. 3).

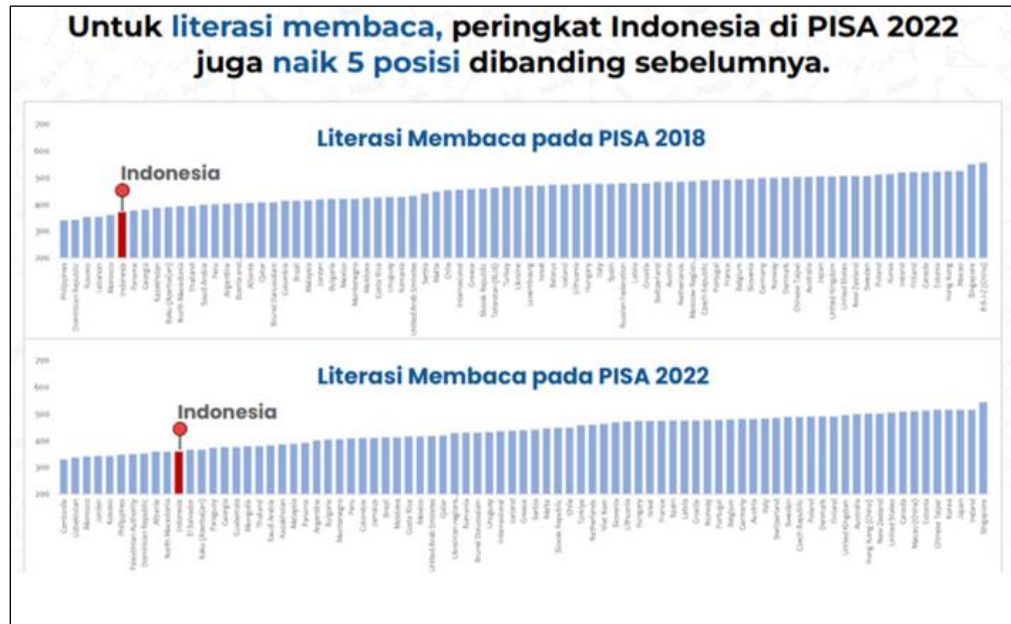
Kemendikbudristek secara resmi memperkenalkan PSP pada Tanggal 1 Februari 2021 melalui kanal Youtube Kemendikbudristek Episode 7 (Tujuh). Dikatakan oleh Menteri Pendidikan pada saat itu yakni Nadiem Makarim bahwa sekolah penggerak ini sebagai katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia.

PSP diimplementasikan dengan terlebih dahulu menetapkan Sekolah Penggerak. Target jumlah Sekolah Penggerak pada tahun pertama adalah 2500 sekolah yang selanjutnya meningkat menjadi 10.000 sekolah pada tahun kedua, 20.000 sekolah pada tahun ketiga, 40.000 sekolah pada tahun keempat dan terus meningkat hingga seluruh sekolah yang ada di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Penentuan sekolah penggerak dilakukan melalui mekanisme seleksi kepala sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mengikuti serangkaian tes yang terdiri atas tes atau seleksi administrasi melalui curriculum vitae, tes skolastik, peer teaching dan wawancara.

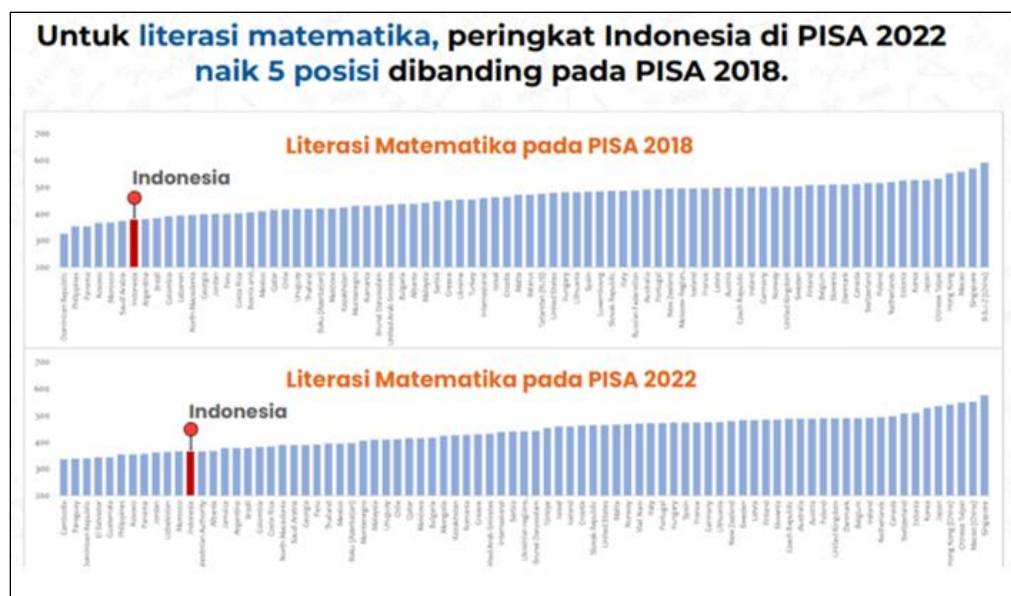
Selain 5 intervensi yang di berikan kepada sekolah penggerak terpilih angkatan pertama pemerintah juga memberikan stimulan tambahan agar program sekolah penggerak ini berjalan dengan lancar yakni Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOSKIN) sebesar Rp. 120.000.000 untuk sekolah jenjang SD, Rp. 175.000.000 untuk sekolah jenjang SMP, dan Rp. 200.000.000 untuk sekolah jenjang SMA selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini dilakukan agar sekolah penggerak mendapatkan boosting pada untuk mempermudah kepala sekolah dan tim mengimplementasikan PSP. Karena pembelajaran berbasis proyek memerlukan fasilitas dan biaya yang luar biasa (Firdaus & Permana, 2020).

Salah satu fokus utama PSP adalah sumber daya manusia yang ada pada satuan pendidikan atau sekolah tersebut. Oleh karena itu, bentuk kegiatan yang khas dari PSP ini adalah berbagai kegiatan terkait pendampingan konsultatif dan asimetris seperti *Project Management Office* (PMO), *Coaching*, Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), Forum Pemangku Kepentingan Daerah (FPKD), Lokakarya dan berbagai kegiatan pendampingan lainnya. Berbagai bentuk pendampingan tersebut dilakukan agar Sekolah Penggerak mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka yang memiliki fokus pada beberapa hal seperti pembelajaran yang berpusat pada siswa, *teaching at the right level*, Proyek Penguatan Profil Pancasila (P5), pelaksanaan asesmen awal pembelajaran, asesmen formatif dan sumatif, pembelajaran diferensiasi (Indah Pratiwi et al., 2020, p. 52).

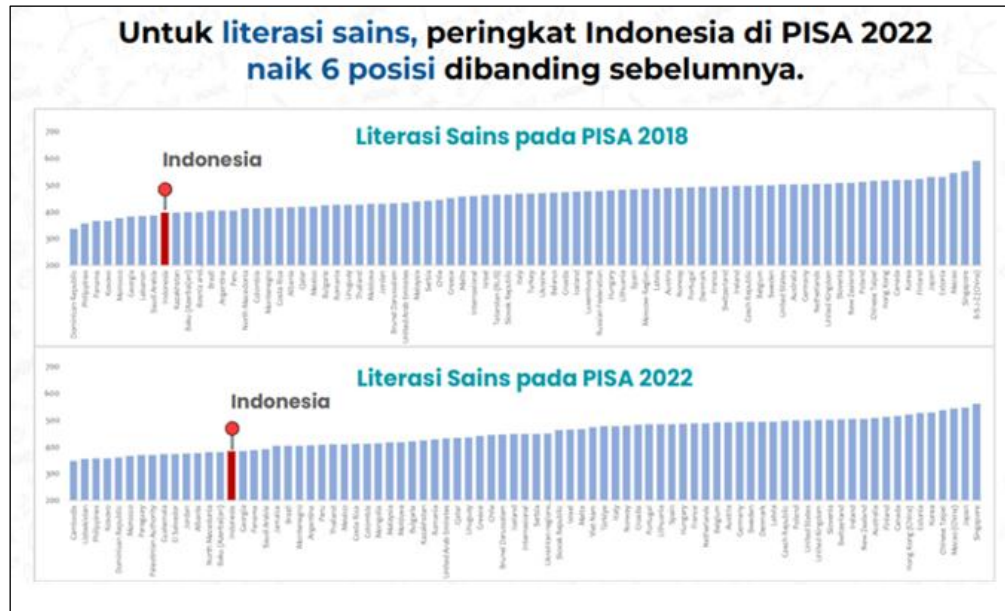
Tranformasi kebijakan pendidikan di episode ketujuh yakni PSP ini menjadi sebuah awal titik terang bagi negara Indonesia pada saat ini. Hal ini dikarenakan hasil PISA 2022 menunjukkan peningkatan yang baik. peringkat literasi, matematika dan sains Indonesia naik dibanding PISA 2018 dengan kenaikan mencapai 5 hingga 6 peringkat (Gambar 1.1, 1.2, 1.3).



Gambar 1.1 Hasil penilaian PISA 2022 tentang pencapaian Literasi di Indonesia  
(Sumber: Laporan PISA Kemendikbudristek, 2023)



Gambar 1.2 Hasil penilaian PISA 2022 tentang pencapaian Matematika di Indonesia  
(Sumber: Laporan PISA Kemendikbudristek, 2023)



Gambar 1.3 Hasil penilaian PISA 2022 tentang pencapaian Matematika di Indonesia (Sumber: Laporan PISA Kemendikbudristek 2023)

Selama mengikuti PISA, hasil asesmen kali ini merupakan capaian tertinggi Indonesia secara peringkat (persentil). Nadiem Anwar Makarim pun dalam pidatonya pada saat perilisn hasil PISA 2022 menyampaikan bahwa kenaikan peringkat ini mencerminkan baiknya sistem pendidikan Indonesia dalam menghadapi dampak hilangnya pembelajaran (learning loss) akibat pandemi. Peningkatan posisi Indonesia pada PISA 2022 menunjukkan kemampuan yang baik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa.

Namun demikian, pemerintah masih harus terus melakukan refleksi dan evaluasi karena pada faktanya tidak semua Sekolah Penggerak mampu mengimplementasikan pembelajaran melalui kurikulum merdeka secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh pelatih ahli/fasilitator PSP yang menyatakan bahwa setiap Sekolah Penggerak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengimpelentasikannya. Hal tersebut merupakan dampak adanya perubahan-perubahan kebijakan oleh pemerintah tentang PSP. Salah satu faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya implementasi kurikulum merdeka pada Sekolah Penggerak dan Teknologi Republik Indonesia (Kepmendikbudristek RI) Nomor 1177/M/2020 menjadi Kepmendikbudristek RI Nomor 162/M/2021 dan kembali berubah

menjadi Kepmendikbudristek RI Nomor 371/M/2021. Dengan terjadinya perubahan regulasi yang begitu cepat ternyata mempengaruhi pada jalannya transformasi pendidikan di sekolah. Selain itu tagihan PMM juga menjadi salah satu keluhan para-KS dan Guru.

Lebih lanjut, hasil penilaian pelatih ahli/fasilitator PSP mengemukakan bahwa kemampuan Sekolah Penggerak dalam menertapkan kurikulum merdeka dipengaruhi oleh kualitas kepala sekolah itu sendiri. Hal tersebut tidaklah mengherankan, karena salah satu komponen penting dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kepala sekolah. Dalam mengelola yang ada di sekolah, kepala sekolah memiliki peranan yang sangat signifikan. Selain dalam implementasi Kurikulum Merdeka, Kepala Sekolah juga memiliki peran penting dalam hal perencanaan pembelajaran seperti melakukan sosialisasi terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran atau juga dapat mengadakan workshop yang dapat diikuti oleh guru dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan guru dalam melakukan penyusunan perangkat pembelajaran. Tidak hanya itu saja, Kepala Sekolah juga berperan sebagai supervisor dimana Kepala Sekolah akan berkunjung ke kelas pada saat guru melakukan proses pembelajaran untuk mengetahui kesesuaian antara perangkat pembelajaran yang telah dibuat dengan proses mengajar guru (Ramadina, 2021, p. 138). Juga, kepala sekolah memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidik, pendayaan serta pemeliharaan sarana dan prasana sekolah. Kepala sekolah adalah orang kunci dalam memajukan mutu Pendidikan di sekolah (Nani & Munipah, 2020, p. 215).

Berbagai model kepemimpinan kepala sekolah telah dikembangkan untuk menjawab fenomena ketidak mampuan pekerjaan pendidikan tidak mampu melihat tingkat pendidikan Boudarbat & Chernoff dalam (Prihatin, 2018, p. 232) hal ini dapat diartikan bahwa beberapa kebijakan mikro, meso ataupun makro belum sepenuhnya mengatasi masalah yang ada. Hingga saat ini belum ada artikel ataupun karya ilmiah lainnya yang dengan spesifik menyoroti kepemimpinan sekolah penggerak yang terjadi adalah berbagai penelitian yang hanya mendeskripsikan berbagai gaya kepemimpinan yang terjadi di sekolah-

sekolah penggerak di Indonesia dengan studi kasus pada satu sekolah. termasuk model kompetensi yang dituangkan dalam regulasi Peraturan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan (Perdirjen GTK) Nomor 6565/B/GT/2020 adalah Wakil dari kemampuan guru dan kepemimpinan dalam pendidikan yang saling terhubung dan menjadi dasar bagi berbagai strategi perubahan dalam pendidikan mencakup: peningkatan kemampuan diri serta pengembangan orang lain, dan kepemimpinan dalam proses pembelajaran yang pada saat ini telah berubah menjadi Perdirjen GTK Nomor 7327/B.B1/HK.03.01/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Perdirjen GTK) Nomor 7327 Tahun 2023 tentang Model Kompetensi Kepala Sekolah dirancang untuk mendukung transformasi pendidikan, khususnya dalam kebijakan Merdeka Belajar. Peraturan ini menetapkan tiga komponen utama kompetensi kepala sekolah: kompetensi teknis, manajerial, dan sosial budaya. Kompetensi teknis meliputi kepribadian, profesionalisme, dan kemampuan sosial, yang semuanya mendukung kepala sekolah dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Kompetensi manajerial melibatkan kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengevaluasi program sekolah secara efektif. Kompetensi sosial budaya mencakup kemampuan memahami keragaman budaya dan memimpin secara inklusif, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran bagi semua siswa. Model kompetensi ini menjadi dasar dalam pengembangan profesionalisme kepala sekolah, termasuk untuk pelatihan, pemetaan kompetensi, dan penilaian kinerja. Dengan penerapan model ini, kepala sekolah diharapkan dapat lebih efektif dalam memimpin perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

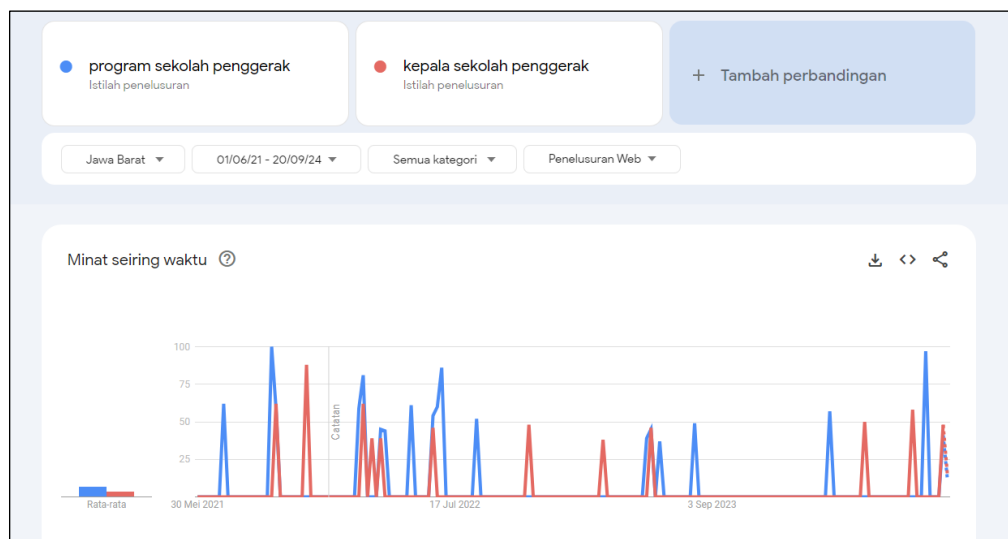
Kepemimpinan sekolah penggerak ini pula yang akhirnya merupakan salah satu isu yang masih menarik untuk dikaji. Hal tersebut terlihat dari *Google Trend* dimana minat masyarakat dalam mencari informasi Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Kepala Sekolah Penggerak di Jawa Barat yang terus meningkat puncaknya di tahun 2022 dari rata-rata kurang dari 25% menjadi 75% untuk Kepala Sekolah Penggerak dan 100% untuk Program Sekolah



Penggerak (Gambar 1.4). Lebih spesifik, minat masyarakat di Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh informasi tentang Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Kepala Sekolah Penggerak cenderung fluktuatif dengan persentase antara 25% sampai 100% (Gambar 1.5).



Gambar 1.4 Minat masyarakat Indonesia dalam mencari informasi Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Kepala Sekolah Penggerak (Sumber: Google Trend, 2023)



Gambar 1.5 Minat masyarakat Provinsi Jawa Barat dalam mencari informasi Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Kepala Sekolah Penggerak (Sumber: Google Trend, 2023)

Mempertimbangkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna menemukan model kepemimpinan baru yang ideal sesuai

dengan kebutuhan sekolah penggerak sehingga model kepemimpinan ini dapat diterapkan di sekolah penggerak lainnya atau bahkan di sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan.

## 1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Isu-isu pendidikan kita tampaknya selalu dihadapkan pada berbagai persoalan dan yang tak kunjung selesai. Semua lapisan masyarakat merasa terlibat, karena pendidikan dianggap sebagai kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, berbagai model pendidikan terus dicari dan dikembangkan, memperkaya pengalaman baik secara teoretis maupun praktis sebagai bagian dari aksi budaya dan transformasi sosial. Oleh karena itu, pendidikan menjadi ruang yang ideal untuk mewujudkan cita-cita dan harapan masa depan, sehingga inovasi pendidikan yang selaras dengan perkembangan budaya dan sosial masyarakat terus berkembang. Hal ini menuntut para pendidik untuk memahami inovasi pendidikan, termasuk konsep, penyebaran, proses keputusan dalam menerima atau menolak inovasi, serta peran agen perubahan. Selain itu, mereka juga perlu memahami strategi perubahan sosial, karena inovasi pada dasarnya adalah bagian dari perubahan sosial itu sendiri.

Berbagai macam hal telah dilakukan pemerintah termasuk dari perubahan kurikulum dari tahun ketahun di mulai kurikulum recana pembelajaran tahun 1947, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, kurikulum paradigma baru, prototype hingga sekarang kurikulum merdeka. Semua ini merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah seiring perubahan jaman dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia.

Kurikulum Merdeka ini digadang-gadang sebagai kurikulum yang berpihak pada murid dilihat dari point utama didalamnya seperti:

- 1) Kurikulum ini dilaksanakan pertama kali oleh para sekolah penggerak.
- 2) Teaching at the right level
- 3) Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

- 4) Materi yang diberikan menjadi lebih sederhana, mendalam dan juga fokus pada materi yang esensial.
- 5) Kurikulum merdeka tidak hanya mengejar capaian pembelajaran tetapi juga menargetkan 6 elemen profil pelajar pancasila.
- 6) Berbagai asesmen menjadi syarat wajib dalam pelaksanaan kurikulum merdeka.

Namun kendati demikian peneliti sangat yakin keberhasilan ini tak luput dari campur tangan dan kegigihan pimpinan di sekolah yakni kepala sekolah itu sendiri. Tiga hal yang dapat berpengaruh pada perubahan sekolah yakni kepala sekolah, kurikulum, dan prestasi siswa (Hallinger, 1989, p. 528). perubahan sekolah baik itu menjadi lebih baik ataupun buruk sebagian besar di sebabkan oleh kinerja pemimpinnya. Dengan kata lain ujung tombak keberhasilan satuan pendidikan bergantung penuh pada siapa yang memimpin. Peneliti pun merasa penelitian ini bersifat urgent untuk dilakukan di kuatkan dengan beberapa penelitian yang menyebutkan masih adanya yang harus dilakukan kepala sekolah penggerak dalam mengimpelementasikan kurikulum merdeka pada pelaksanaan kebijakan kurikulum sekolah penggerak (Dinanty, 2024, p. 62). Meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan berbagai kelebihan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, tantangan dalam implementasinya perlu segera diatasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. (Firdaus & Permana, 2020, p. 1) pentingnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru dan staf pendidikan, peningkatan fasilitas sekolah, serta peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar (Dinanty, 2024, p. 61).

Berdasarkan identifikasi masalah dan penelitian yang menunjukan urgensi penelitian ini harus dilakukan, maka peneliti fokus pada:

- 1) Menelaah mutu pendidikan pada sekolah penggerak angkatan pertama.
- 2) Menelaah strategi kepemimpinan sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka.
- 3) Menelaah faktor pendukung dan tantangan pada pelaksanaan kepemimpinan di sekolah penggerak.
- 4) Menelaah dampak inovasi yang dilakukan para kepala sekolah penggerak.

- 5) Menelaah dan mengeksklore pengembangan kepemimpinan di sekolah penggerak yang efektif.

Pertanyaan penelitian dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penting sebagai berikut:

- 1) Bagaimana gambaran mutu pendidikan sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Sukabumi?
- 2) Bagaimana startegi kepemimpinan di sekolah penggerak angkatan pertama dalam implementasi kurikulum merdeka di Kota Sukabumi?
- 3) Apa saja faktor pendukung dan tantangan pelaksanaan kepemimpinan di sekolah penggerak angkatan pertama kota sukabumi?
- 4) Bagaimana dampak dari inovasi yang dilakukan kepala sekolah Penggerak angkatan pertama di Kota Sukabumi?
- 5) Bagaimana Model Kepemimpinan Sekolah Penggerak yang efektif?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bermaksud melakukan mengkaji dan menganalisis untuk mendapatkan model hipotesis Kepemimpinan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang peneliti asumsikan sebagai model yang paling efektif dan tepat untuk diterapkan di sekolah penggerak dan sangat memungkinkan dapat di aplikasikan pada seluruh sekolah yang ada di Indonesia karena seperti yang Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim katakan bahwa pada akhir sekola di Indonesia ini akan menjadi sekolah penggerak. Kepemimpinan pendidikan memainkan peran krusial dalam studi administrasi pendidikan dan menjadi elemen kunci dalam pengembangan atau pembentukan karakter di lingkungan sekolah. Pada sisi lain, belum ada gambaran jelas model pemimpin seperti apa yang di butuhkan di sekolah penggerak. Hal ini menjadi sangat menarik dan penuh manfaat apabila penelitian ini menganalisis dengan tajam dan komprehensif dalam rangka mendapatkan deskripsi dan ukuran yang jelas berkaitan dengan kepemimpinan sekolah penggerak. Oleh karena itu, secara rinci tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Terdeskripsikannya gambaran mutu pendidikan di sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Sukabumi.
- 2) Terdeskripsikannya strategi kepemimpinan di sekolah penggerak angkatan pertama dalam implementasi kurikulum merdeka di Kota Sukabumi.
- 3) Teranalisisnya faktor pendukung dan tantangan pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Sukabumi.
- 4) Teranalisisnya dampak dari inovasi yang dilakukan kepala sekolah Penggerak angkatan pertama di Kota Sukabumi.
- 5) Tersusunnya model kepemimpinan sekolah penggerak yang efektif.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat dari empat segi 1) segi teori, 2) segi kebijakan, 3) segi praktik, dan 4) segi sosial sebagaimana berikut. (Marshall & Rossman, 2006, p. 6)

- 1) Dari segi teori, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan rujukan tambahan dalam kajian pelaksanaan kepemimpinan di Sekolah Penggerak dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kota Sukabumi.
- 2) Dari segi kebijakan, penelitian ini bermanfaat sebagai pertimbangan keberlanjutan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan program perbaikan atau pengembangan sekolah penggerak terlebih dalam pengambilan kebijakan selanjutnya yang terkait hal tersebut.
- 3) Dari segi praktik, penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa model kepemimpinan sekolah penggerak dapat menjadi alternatif untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu sehingga negara Indonesia mampu bersaing secara global dan nilai PISA untuk Indonesiapun otomatis meningkat jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh ahli mutu yakni seorang Philip Crosby dalam (Rahman 2020) bahwa salah satu dari sebuah kebenaran kualitas adalah “Zero defect and right first time” (Rahman, 2020, p. 41). Selain itu juga

penelitian ini bisa dijadikan landasan yang mampu memproduksi sebuah instrumen kepemimpinan sekolah penggerak.

- 4) Dari segi sosial, penelitian ini dapat menjadi pencerahan kepada masyarakat bahwa sekolah penggerak adalah alternatif terbaik saat ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik secara umum maupun khusus.

## 1.5 Struktur Penelitian

Disertasi ini terdiri dari beberapa bab. Pada bab I Pendahuluan Bagian ini mencakup pembahasan pengantar dan berfungsi sebagai pembuka disertasi. Di dalamnya terdapat latar belakang penelitian, identifikasi serta perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta susunan organisasi penelitian.

Bab berikutnya yakni bab kedua tentang kajian pustaka pada bab ini dipaparkan gambaran teori/kepemimpinan penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran yang menjadi dasar teoritis dalam penelitian ini. Isi bab ini mencakup berbagai teori dan konsep tentang kualitas pendidikan, kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan program Sekolah Penggerak, serta model kepemimpinan yang sesuai dengan kebijakan tersebut.

Bab ketiga yakni tentang metode penelitian ini menyajikan penjelasan mendalam tentang metode penelitian, mencakup: tempat dilakukannya penelitian, rancangan penelitian, pendekatan serta metode yang digunakan, cara pengumpulan data, dan proses analisis data.

Pada bab ke empat ini menyajikan hasil penelitian, disertai dengan analisis dan pembahasan mengenai temuan tersebut, serta membahas model kepemimpinan sekolah dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Bab terakhir yakni Kesimpulan dan Saran menyampaikan interpretasi serta pemahaman peneliti terhadap temuan yang diperoleh.